## Determian Pertumbuhan Kota [Tinjauan Teoritik]

Buku Determinan Pertumbuhan Kota (Tinjauan Teoritik) dapat diselesaikan dengan boik. Buku ini dharapkan dapat memberikan sumbangsih, dan dirancang dengan sistematika kajian teoiritis dan disadur dari berbagai hosil penelitian dan karya-karya di bidang sehingga memudahkan mahariswa dan civitas akademika membaca dengan lebih terstruktur. Perulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan kelimuan bidang Determinan Pertumbuhan Kota (Tinjauan Tearitik).

# Determi<u>an</u> Pertumbuhan Kota

(Tinjauan Teoritik)





#### Published by:

Hesearth

Jl. A. Yani. Sokajaya 59 Purwokerto New Villa Bukit Sengkaling c9 No. 1 Malang HP 081 333 252 968 WA. 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

email: buku.irdh@gmail.com



# DETERMINAN PERTUMBUHAN KOTA (TINJAUAN TEORITIK)

### **AHMAD YUNANI**

CV. IRDH

## DETERMINAN PERTUMBUHAN KOTA (TINJAUAN TEORITIK)

Oleh : Ahmad Yunani

Perancang sampul : Rojagid Ariadi Mohammad

Penata Letak : Agung Wibowo

Penyunting : Cakti Indra Gunawan

Pracetak dan Produksi : Yohanes Handrianus Laka

Hak Cipta © 2019, pada penulis Hak publikasi pada CV IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama Mei 2019

Penerbit CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP 081333252968 WA 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

Email: buku.irdh@gmail.com

ISBN: 978-602-0726-96-0

i-xiiint + 134 hlm, 25 cm x 17.6 cm

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala karuniaNya lah sehingga buku Determinan Pertumbuhan Kota (Tinjauan Teoritik) dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang selama ini telah mendukung proses penyelesaian buku ini. Dan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, kami juga ucapkan terima kasih. Akhirnya penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan bidang Pertumbuhan Kota. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada penulis demi kebaikan dan perbaikan dalam buku ini.

Banjarmasin, 6 Maret 2019

Penulis

### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN KOTA	4
2.1 Pembangunan Ekonomi	4
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	. 10
2.3. Kota dan Pertumbuhan Kota	. 13
2.4. Ekonomi Regional	. 19
2.5. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kota	. 28
2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota	. 30
2.7. Produkitivitas dan Kualitas Hidup Kota	. 32
BAB 3 PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SEKTORAL	. 37
3.1. Teori Pembangunan Regional dan Sektoral	. 37
3.2. Permasalahan Pokok Ilmu Ekonomi Regional	. 38
3.3. Peranan Ruang Dalam Analisa Ekonomi	. 39
3.5. Teori Lokasi dan Analisa Spasial	. 44
3.6. Model Mobilitas Antar Wilayah	. 52
3.8. Model Pertumbuhan Ekonomi Regional	. 56
3.9. Penerapan Teori Pertumbuhan Regional	. 58
3.10. Konsep Local Economic Development dan Penerapannya di Indonesia	63
BAB 4 PENATAAN KOTA	. 67
4.1. Pendektan Teori Penataan Kota dan Lingkungan	. 67
4.2. Pendekatan Penataan Ruang dalam Pengembangan Wilayah Berbasi Lingkungan dan Berkelanjutan	

4.3. Penyiapan Kota – kota di Indonesia dalam Menghadapi Pe	rubahan
Iklim	83
4.4. Pengaruh Lingkungan Hidup yang Positif dan Negatif di Pe	rkotaan 83
4.5. Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup di Perkotaan	86
4.6. Teori Ekonomi Publik	89
4.7. Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia	91
4.8. Teori Kesejahteraan	92
BAB 5 TINJAUN EMPIRIS PERTUMBUHAN, PENATAAN DA	AN
PEREKONOMIAN KOTA	95
5.1. Penelitian Pertumbuhan Kota	95
5.2. Penelitian Perekonomian Kota /Daerah	95
5.3. Penelitian Penataan Kota	100
5.4. Penelitian Kesejahteraan	102
BAB 6 PENUTUP	103
DAFTAR PUSTAKA	105
GLOSARIUM	109
INDEKS	111
TENTANG PENI II IS	113

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pembangunan mengalami redefinisi, yang pada era sebelum 1970 an pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja yang sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu Negara hanya diukur dengan berdasarkan tingkat pertumbuhan *Gross National Income* (GNI) yang diyakini dapat menetes ke bawah (*tricle down effect*). Setelah era 1970 definis pembangunan pembangunan ekonomi mengalami redefinisi penghapusan atau pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan redistribusi hasil pembangunan yang lebih merata. (Todaro dan Smith, 2006) Peranan pemerintah sangat penting dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin pada penerimaan luas yang nyaris bersifat universal atas peranan dan fungsi perencaan pembangunan sebagai jalur yang paling langsung dan paling meyakinkan untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Perencanaan ekonomi sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang dari pemilihan kegiatan implementasi, kordinasi dan pemantauan rencanan pembangunan. Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari tingkat tabungan dan pertumbuhan capital (*physical capital*) seperti yang dikembangkan oleh Harold (1939) — Domar (1946), Solow (1956) maupun human capital dalam teori pertumbuhan endogen (endogenues

growth). Eksternalitas teknologi dan human capital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang diperluas dengan memperhatikan karakteristik dasar suatu negara (Bradley dan Gans 1998). Peran karakteristik dasar suatu negara menjelaskan perbedaan pertumbuhan output per kapita, dikemukakan dalam studi pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis lintas negara yang diaplikasikan pada tingkat regional dalam analisis pertumbuhan regional (Barro, 1989. Glaeser et. Al (1995), Bradley dan Gans (1998) memperluas penggunaan karakteristik dasar suatu wilayah untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di tingkat kota secar *cross section*.

Kegiatan perekonomian yang mendominasi di negara maju adalah perekonomian perkotaan dengan berbagai masalah perkotaan seperti pertumbuhan perkotaan, penggunaan lahan perkotaan, persaingan kegiatan ekonomi, social dan politik pada tata ruang perkotaan (Rahardjo, 2005). Peran kota sebagai pusat aktivitas utama ekonomi sehingga pertumbuhan kota perlu diperhitungkan. Kota mempunyai aktivitas ekonomi yang mendominasi aktivitas perekonomian suatu negara. Kota dapat dipandang sebagai mesin inovasi dan pertumbuhan perekonomian modern sebagai penyedia komoditas penting yaitu informasi.

Kota mempermudah kegiatan produksi barang dan jasa serta aktivitas perekonomian lainnya. Kota memnyediakan penawaran berbagai produk barang dan jasa yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi penduduknya, disisi lain kota juga menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan perkotaan yang menonjol dan menarik untuk dianalisisi seperti kemiskinan, diskriminasi, kriminalitas, kerawanan social, degredasi lingkungan,

pertumbuhan daerah metropolitan, konflik pusat kota dengan daerah pinggiran dan lainnya. Masalah – masalah perkotaan tersebut semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan kota yang bertambah pesat dan luas.

Analisis pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional terutama kota memberikan manfaat untuk melengkapi analisis tingkat negara secara mendalam, pertama kota lebih terbuka secara ekonomi, dan mobilitas factor produksi semakin besar, kedua banyak studi pertumbuhan secara cross section mengarahkan pada pemikiran yang penting bagi pertumbuhan, ketiga studi pertumbuhan ekonomi lintas negara difokuskan pada social politik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Peran kota sebagai pusat aktivitas utama ekonomi menjadi daya tarik mengapa pertumbuhan kota perlu diperhatikan, populasi kota kota besar, pertumbuhan diukur dengan menggunakan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dengan aspek yang mempengaruhinya seperti kepadatan penduduk, spesialisasi ekonomi, ratio penduduk kota terhadap penduduk propinsi (primacy), manufaktur dan tingkat pendidikan, serta pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Imam dan Bambang, 2004).

Pertumbuhan kota dilihat dari perkembangan penduduknya, penduduk Indonesia yang tinggal perkotaan yang tinggal pada tahun 1920 (5,8% dalam Soegijoko dan Bulkin, 1994), pada tahun 1980 penduduk kota telah mencapai 22,3% dan tahun 1990 meningkat menjadi 30,9% (Firman dan Prabatmojo, 2001). Penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dari jumlah yang ada pada saat ini dalam 69 tahun mendatang (Tjiptoheriyanto, 1997).

# BAB 2 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN KOTA

#### 2.1 Pembangunan Ekonomi

Konsep-konsep pembangunan ekonomi dan modernisasi baik secara implicit maupun eksplisit senantiasa memiliki premis nilai tentang tujuan – tujuan yang diinginkan untuk mencapai sesuatu oleh Mahatma Gandhi disebut sebagai realisasi potensi manusia. Konsepkonsep luhur dalam proses pembangunan seperti pemerataan ekonomi dan sosial, pemberantasan kemiskinan, pendidikan bagi segenap masyarakat, peningkatan taraf hidup, kemerdekaan bangsa, modernisasi kelembagaan, partisipasi politik dan ekonomi, pengakuan demokrasi, pembinaan pemeliharaan kemandirian usaha. serta pemenuhan kepuasan perseorangan, seluruhnya bertolak dari pertimbangan-pertimbangan atas nilai-nilai subjektif tentang hal-hal yang baik dan yang diinginkan atau hal-hal yang sebaliknya. Ilmu ekonomi yang pada dasarnya ilmu pengetahuan social yang menyoroti sistem-sistem social yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang mendasar (seperti pangan, sandang dan papan) untuk memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat non material (seperti pendidikan, pengetahuan, dan pemuasan spritual).

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riel perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Arsyad, 1996; 6). Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang menunjukkan ada saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara factor-faktor sumber daya ekonomi yang akan mewujudkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui tahapan waktu dan tahapan prosesnya. Irawan dan Suparmoko, 1992 dalam Warsilan, 2010 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Pembangunan ekonomi juga dipandang sebagai kenaikan penerimaan dan timbulnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang diiringi dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduk, sehingga pertumbuhan kegitan ekonomi harus digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh pertumbuhan PDB atau PDRB sama dengan atau lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan penduduk maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau bahkan menurun yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pendapat para ekonom tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan perkembangan ekonomi, sedangkan pendapat kedua memandang bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi. pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi.

pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi. Pendapat Baran dan Kuznet (1996) dalam Fitriadi, 2008; 23 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan perkembangan ekonomi yaitu peningkatan pendapatan perkapita atau produksi total. Yang berarti ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat pertumbuhan ekonomi dengan indicator terjadinya peningkatan pendapatan perkapita atau produksi total. Profesor Paul A. Baran dalam Jhingan, 2000; 5 berpendapat gagasan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi mengesankan suatu peralihan ke suatu yang baru dari sesuatu yang lama dipergunakan. Profesor Arthur Lewis mengatakan seringkali pertumbuhan mengacu pada kemajuan atau perkembangan hanya sebagai variasi.

Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara yaitu:

- Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka panjang. Pendapatan nasional nyata menunjukkan pada keseluruhan output barang – barang jadi dan jasa dari negara itu dalam arti nyata ketimbang dalam arti uang, jadi perubahan harga harus dikesampingkan pada waktu menghitung pendapatan nasional.
- 2. Berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Menurut Profesor Meier mendefinisikan perkembangan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang. Profesor Baran membenarkan pendapat ini menyatakan kenaikan output per kapita barang-barang material dalam jangka waktu. Buchanan dan Ellis dalam Jinghan, 2000; 6 menyatakan perkembangan berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata negara-negara terbelakang dengan menggunakan

- investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata perorang.
- 3. Definisi ketiga menjelaskan perkembangan ekonomi dari titik titik kesejahteraan ekonomi. Perkembagan ekonomi sebagai proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Okun dan Richardson dalam Jinghan, 2000; 7 menyatakan perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan jangka panjang yang dapat diihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.

Pendapat yang berbeda dari Kidleberger dan Chenery dalam Fitriadi, 2008; 24 tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk sedangkan perkembangan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan perkapita yang diiringi perombakan dan modernisasi struktur ekonomi. Schumpeter menyatakan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang pertumbuhan ekonomi bagi negara maju. Hick mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut perkembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan kedati telah dikenal, sedangkan negara maju terkait dengan pertumbuhan karena telah diketahui dan dikembangkan. Bonne berpendapat perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan dan pedoman dalam rangka penciptaan kekeuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan. Jadi dari beberapa pendapat berbeda ini terletak pada implikasi dari

kedua istilah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi seperti perubahan perilaku dan perubahan teknologi serta perubahan kelembagaan. (Jinghan, 2000; 5)

Pengertian pembangunan ekonomi mempunyai dimensi yang luas dari pengertian pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi mencakup didalamnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mensyaratkan kesejahteraan penduduk harus meningkat dengan salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi (Hakim, 2002; 12). Menurut Todaro, 2006; 21 pembangunan harus dipandang sebagai proses multideminsional dengan adanya perubahan social (social change) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi mencakup 4 pengertian, yaitu:

- a) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus.
- b) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c) Kenaikan tersebut berlangsung dalam jangka panjang.
- d) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya di bidang ekonomi, politik, hukum sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun non formal).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut (Arsyad, 2005).

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekananan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogneus development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pengembangan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas-kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

#### 2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil jadi pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil per orang. Struktur ekonomi dari negara-negara di dunia telah mengalami perubahan dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terusmenerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Cerminan perubahan struktur terlihat dari peranan sector-sektor ekonomi terhadap pembentukan produk nasional bruto (PNB) dan besarnya proporsi tenaga kerja pada masing-masing sector ekonomi (Kamaludin, 1998;29). Perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan terjadinya perubahan sisi permintaan dan sisi penawaran selain secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh intervensi pemerintah (Tambunan, 2001; 75). Selain memperbesar permintaan barang-barang yang ada juga memperbesar pasar bagi barang-barang baru bukan makanan, perubahan ini mendorong pertumbuhan industry baru dan meningkatkan laju pertumbuhan output industry.

Menurut Professor Kuznets dalam Todaro (2000) terdapat 6 (enam) karakteristik atau ciri pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui dihampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

- a) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi
- c) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
- d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
- e) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru
- f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu dihasilkan akibat timbulnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah pada periode tertentu. Besar kecilnya sumbangan nilai tambah terhadap pembentukan PDRB di suatu daerah sangat tergantung pada faktor produksi yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh suatu daerah tersebut.

Pengertian PDRB dapat diartikan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh tingkat berbagai unit produksi dalam suatu wilayah (region) pada jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

#### b) Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang kuat dalam proses produksi disuatu wilayah (region) pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut dalam bentuk upah, sewa tanah, bunga modal dan surplus usaha/kewirausahaan (entrepreneurship), dimana balas jasa tersebut belum dipotong pajak dan pajak tak langsung lainnya termasuk penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto. Jumlah seluruh komponen pendapatan tersebut disebut nilai tambah bruto.

#### c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Ekspor netto yang dimaksud disini adalah jumlah ekspor (luar wilayah) setelah dikurangi dengan jumlah impor yang dilakukan di wilayah tersebut.

Serangkaian perubahan structural dalam perekonomian terjadi by prosess dan by design. Proses perubahan stuktur ekonomi terjadi secara alamiah sedangkan perubahan struktur dengan desain apabila perubahan ekonomi yang perubahanya mengikuti rencana atau pola yang telah ditentukan. Indikator pentingnya adalah struktur produksi, struktur dan struktur kesempatan kerja.

Gejala transpormasi struktur ekonomi yang diamati Kuznet memperlihatkan pergeseran yang berjalan dengan pesat sekali, yaitu pergeseran dari sector pertanian menuju sector industry sejalan dengan pergeseran dengan kenaikan dalam perndapatan perkapita, Hukum Engel (Chenery and Syrquin, 1975; 79-80) menjelaskan bahwa masyarakat yang telah cukup memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat terjadi kenaikan pendapatan maka bagian pendapatan yang digunakan untuk tujuan konsumsi pangan akan menurun. Perubahan struktur ekonomi dapat dilihat secara relative dari persentase nilai tambah (*value added*) terhadap PDB untuk sector pertanian dan industry. Kontribusi sector terhadap PDB adalah sebagai indicator untuk mengetahui perubahan struktur. Disamping itu indicator kontribusi sector juga dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana tahap industrialisasi suatu negara, regional, daerah dan kota.

Keterkaitan studi dengan teori yang diuraikan memiliki relevansi karena studi ini memasukkan variable-variabel yang menjadi determinan dalam pertumbuhan kota, perekonomian kota, penataan kota dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.3. Kota dan Pertumbuhan Kota

Kota memiliki pengertian sebagai kesatuan ekonomi dan kesatuan politik. Secara ekonomi mencakup area yang didalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang menyatu dan batasanya ditentukan tingkat aktivitas ekonomi terintegrasi. Secara politik kota mencakup area dimana pemerintah kota menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Masalah kota dan perkotaan telah lama mendapatkan perhatian terutama di Eropa sebelum Revolusi Industri. Dengan berkembangnya revolusi indutri maka jenis industry didirikan disuatu tempat yang mengundang banyak buruh tenaga kerja bermukim di sekitar pabrik, maka mulai

muncul dan terjadi konsentrasi penduduk. Konsentrasi penduduk membutuhkan perumahan dan tersedianya prasana jalan, fasilitas – fasilitas pelayanan ekonomi dan social. Karakteristik social daerah perkotaan dalam konsentrsi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, social dan pemerintahan pada tata ruang perkotaan adalah essensial. Konsentrasi spasial (tata ruang) adalah fakta utama, lahan perkotaan yang tersedia adalah terbatas sedangkan kegiatan perkotaan mengalami pertumbuhan yang pesat, urbanisasi meningkat, menimbulkan kecenderungan terjadinya kepadatan penduduk, perumahan dan lalu lintas. Dampaknya bagi perekonomian adalah ketidak efektivan dan ketidak efesienan serta berpengaruh terhadap kesejahteraan warga kota (Rahardjo, 2010; 1-2). Masalah perkotaan yang dihadapi sangat luas baik masalah makro maupun masalah mikro, masalah makro adalah masalah yang berkaitan dengan fungsi kota bagi wilayah sekitar sedangkan masalah mikro adalah masalah yang berkaitan dengan masalah internal kota.

Masalah kota secara makro antara lain adalah: 1) kota sebagai pusat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan budaya; 2) kota memiliki fungsi jasa distribusi (jasa perdagangan dan pengangkutan); 3) kota merupakan lokasi industry pengolahan dan jasa. Keseluruhan dari fungsi-fungsi tersebut harus dilihat dalam konteks bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kota-kota itu secara efektif dan efesien dalam melaksanakan fungsinya. Kota efesien meliputi efesiensi dalam penataan dan penggunaan tata ruang perkotaan, penggunaan sarana dan prasarana pembangunan.

Masalah kota secara mikro adalah : a) masalah penanganan pertumbuhan penduduk yang cepat; b) masalah migrasi penduduk dari

desa ke kota; c) masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang makin luas; d) kebutuhan akan lahan perkotaan yang makin bertambah besar untuk kegiatan usaha; e) kebutuhan akan tersedianya fasilitas pelayanan ekonomi (pasar, pertokoan, bank, angkutan umum) dan fasilitas social (sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga, perpustakaan dll) baik dalam jumlah yang cukup maupun dalam kualitas yang memadai.

Permasalahan perkotaan menurut Rahardjo, 2010; 3 dapat dibagi dalam berbagai kelompok yaitu : 1) Keadaan lingkungan fisik perkotaan kurang memadai antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak terencana, sikap hidup pendatang baru yang masih asing dengan tata kehidupan kota, penciptaan lapangan kerja yang terbatas, kebutuhan perumahan yang meningkat terus, penentuan lokasi industry yang tidak terarah, penataan lahan yang tidak efesien, terbatasnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan, kurangnya fasilitas prasarana kota seperti transportasi umum dan masih banyak yang lainnya; 2) Perencanaan dan program pembangunan kota serta kordinasi pelaksanaannya menghadapi berbagai kelemahan, kompleksitas permasalahan perkotaan, kemampuan aparat yang lemah sehingga tidak mudah membuat perencaan kota yang komprehensif; 3) Prasarana dan sarana perkotaan masih relative terbatas disamping itu sarana penunjangnya seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya; 4) Partisipasi masyarakat dari lapisan atas sampai lapisan bawah untuk menunjang pembangunan kota belum dikembangkan secara luas dan masih belum optimal; 5) norma-norma tata tertib pergaula social, tertib hokum dan tertib kemasyarakatan ternyata sering kurang efektif disebabkan antara lain karenan kondisi social ekonomi yang rendah dari berbagai penghuni kota dan terdapat pihak-pihak yang sengaja mengabaikan peraturan – peraturan yang berlaku sehingga mengganggu tata kehidupan masyarakat kota.

Jika ditelusuri terbentuknya kota menurut Rahardjo, 2010; 4 pada mulanya merupakan tempat persinggahan dari perjalanan jauh, untuk pertimbangan keamanan para persinggahan dalam jumlah yang banyak tersebut dimanfaatkan tukar menukar barang dagangan, selanjutnya tempat persinggahan berubah menjadi pasar yang berkembang makin ramai sebagai embrio terbentuknya kota-kota kecil yang beberapa diantaranya berkembang menjadi kota menengah dan kota besar. Berkembannya menjadi kota menengah dan kota besar karena memiliki peluang terjadinya efesiensi dalam kegiatan ekonomi meliputi kegiatan-kegiatan pemasaran, transportasi dan kerajinan rakyat (industry rumah tangga) yang selanjutnya berkembang lebih efesien lagi dan fungsinya berubah bertambah luas sebagai pusat perdagangan, transportasi, multi industry pengolahan (manufacturing), pelayanan pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan perbankan, jasa kontruksi disamping pusat pelayanan pemerintahan umum dan pembangunan untuk melayani kebutuhan penduduk. Pemerintah kota membangun prasarana dan sarana perkotaan serta fasilitas ekonomi dan social. Jika berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi perkotaan didukung efesiensi private services maka penyelenggaraan pelayanan umum perkotaan (public services) harus diupayakan seefesien mungkin. Kota yang efesien memberikan dampak kesejahteraan penduduk perkotaan. Kegiatan ekonomi perkotaan dan pelayanan umum perkotaan yang efesien akan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perkotaan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk terus bertambah kebutuhan hidup manusia baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa cenderung meningkat pula, baik jumlah maupun jenisnya seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang social, ekonomi dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah makan senantiasa kegiatan usaha manusia juga akan ditingkatkan. Peningkatan berbagai bentuk usaha memerlukan penambahan kapasitas produksi untuk menghasilkan output yang lebih besar dan makin besar dalam bentuk barang dan jasa. Peningkatan dalam kapasitas produksi dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi masyarakat dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi (economic growth). Secara konvensional pertumbuhan ekonomi diukur dengan kenaikan pertambahan output atau pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Peningkatan kapasitas produksi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan penyediaan modal disamping tenaga kerja dan teknologi. Pemupukan modal diperlukan untuk melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebar letaknya, lokasi industry pengolahan umumnya terpusat dan konsumen akhir tersebar letaknya. Terpusatnya berbagai industry kegiatan produktif lainnya berada pada tempat-tempat yang biasanya yang disebut kota. Kota berfungsi sebagai terminal jasa distribusi yaitu jasa perdagangan, dan jasa angkutan. Suatu kota melayani pelayanan pemasaran pada wilayah sekitar yang dinamakan wilayah pengaruh. Semakin besar kota semakin luas wilayah pengaruhnya dan sebaliknya.

Kota besar memiliki fasilitas perdagangan dan angkutan yang relative lengkap dan memiliki kegiatan jasa industry yang lebih intensif dibandingkan dengan kota-kota kecil. Gambaran di atas menunjukkan fungsi kota itu dilihat secara sempit atau secara internal adalah terkonsentrasinya penduduk kota pada suatu kota dan berkelompoknya berbagai kegiatan produktif itu adalah diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota, secara eksternal fungsi kota kota itu adalah memposisikan pada keterkaitan dengan kota-kota lainnya dalam kegiatan perdagangan dan pengangkutan. Di daerah perkotaan terdapat konsentrasi fasilitas – fasilitas pelayanan ekonomi dan social yang relative lebih lengkap dibandingkan di daerah-daerah luar kota. Semakin tinggi tingkat kemudahan semakin kuat daya tarik kota yang mengundang manusia untuk datang berkegiatan. Daerah – daerah nodal (kota) mempunyai kegiatan perekonomian yang sangat penting dalam pembangunan wilayah.

Teori pertumbuhan kota menurut Rahardjo, 2005; 42 menginterpretasikan hubungan antara besarnya kota dan pertumbuhan kota dapat dijelaskan, pertama sebagai kota industrialisasi yang menjelaskan kota semakin penting fungsinya ditinjau dari pertimbangan ekonomi, karena industry memerlukan tenaga kerja dan keterampilan. Jika kapasitas untuk menarik dan mengembangkan industry merupakan determinasi utama pertumbuhan kota maka suatu kota dapat tumbuh dengan mengadakan penyesuaian kembali struktur spasialnya sehingga dapat mengabsorbsi industry-industri baru secara efesien, suburnisasi industry dan fungsi-fungsi komersial ke pusat suburb, perluasan batas kota, pembangunan perumahan dan fasilitas transportasi untuk para komuter. Kedua, masyarakat kota bertambah besar karena terjadi

konsentrasi peduduk yang memerlukan jasa pelayanan yang lebih banyak dan luas misalnya perumahan, jasa social, fasilitas distribusi, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Potensi pertumbuhan suatu kota tergantung pada kemampuan untuk menciptakan dan menarik sumber daya produktif untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar regional dan nasional. Kapasitas suatu kota untuk memperluas stok sumber daya dibatasi oleh tingkat pertambahan penduduk alamiah, akumulasi modal dan hasrat manajer dan innovator meningkatkan produktivitas. Kota – kota yang mempunyai tingkat pertumbuhann tinggi harus mampu menarik factor-faktor produktif dari luar, harus menarik migrant, modal, skill, dan inovasi dari luar sehingga kota menjadi pusat inovasi.

Pusat kota dapat dikatapan pula dengan istilah tempat sentral (central place) yang berarti fungsi-fungsi sentral sebagai fungsi utama kota sebagai pusat pelayanan untuk daerah hinterland di sekitarnya yang disebut daerah komplementer, mensupply kebutuhan barang dan jasa. Menurut teori central place kota tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari permintaan barang dan jasa daerah sekitarnya atau dengan kata lain pertumbuhan kota merupakan fungsi dari penduduk daerah hinterlandnya dan sudah tentu pula mempunyai fungsi dari tingkat pendapatannya.

#### 2.4. Ekonomi Regional

Umumnya dalam pengukuran tingkat perkembangan wilayah seringkali parameter tingkat perkembangan suatu wilayah dan ukuran keberhasilan pembangunan identik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan dengan perubahan atau peningkatan

dalam produk domestic bruto-nya. Kesejahteraan masyarakat akan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi. Pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi diharapkan akan terjadi penetesan ke bawah (trikle down) dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya.

Ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut untuk menggambarkan bahwa suatu wilayah telah berkembang dan mensejahterkan rakyat belum cukup, karena hanya mengejar target pertumbuhan padahal aspek lainnya seperti pemerataan pendapatan dan pelesetarian lingkungan juga perlu diperhatikan. Masalah - masalah yang masih kurang terperhatikan diantaranya seperti kemiskinan, distribusi pendapatan dan pemerataannya, dampak kerusakan lingkungan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (Ruchyat, 2010; 19). Konsep pengembangan wilayah juga dikaitkan dengan aspek penataan ruang diperkenalkan oleh Hirschman (1958) dan Myrdal (1957) yang menjembatani model pertumbuhan ekonomi wilayah dengan teori pengembangan wilayah (United Nations, 1979) dalam Ruchyat, 2010; 27).

#### 2.4.1. Pendekatan Ekonomi Regional

#### 1) Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan

pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan diatas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005).

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 2005). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk membagi daerah ke dalam kegiatan basis dan non basis:

#### a. Metode Langsung

Metode ini mengukur basis dengan menggunakan survey standar dan kuesioner. Cara ini dapat menghindarkan digunakannya kesempatan kerja sebagai indikator. Tetapi metode ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

#### b. Metode Tidak Langsung

Yang termasuk metode ini adalah metode *Location Quotient* (LQ) dan cara pendekatan Asumsi Adhoc. Metode yang lazim digunakan dalam studi-studi empirik yaitu metode LQ. *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesalisasi sektor-sektor basis atau unggulan.

Dalam analisis LQ, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.
- Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri.

Logika dasar analisis ini adalah teori basis ekonomi (economic base theory) yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Hal tersebut akan menaikan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikan permintaan akan sektor non basis. Kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain.

Dengan alasan tersebut, sektor basis mestinya harus dikembangkan terlebih dahulu. Teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (sektor) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan

peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat daerah referensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama), produktivitas tenaga kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogen) pada setiap sektor.

Formula untuk Location Quotient (LQ), yaitu:

$$LQ = \frac{\frac{Vij}{Vj}}{\frac{Vin}{Vn}}$$

Keterangan:

*LQ*= *Location Quotient* 

Vij= Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi j (kabupaten/kotamadya)

Vj= PDRB total semua sektor di daerah studi j

Vin= Nilai output (PDRB) sektor i daerah referensi n (Provinsi)

*Vn*= PDRB total di semua sektor daerah referensi *n* 

Berdasarkan formulasi yang ditunjukan dalam persamaan diatas, maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan, yaitu:

a. Jika nilai LQ lebih besar dari 1 (LQ>1), ini berarti laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi n. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi j sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi j.

- b. Jika nilai LQ lebih kecil dari 1 (LQ<1), ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi n. Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi j dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi j.
- c. Jika nilai LQ sama dengan 1 (LQ=1), ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi n.

Penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat digunakan untuk menganalisis tentang ekspor-impor (perdagangan) suatu daerah. Namun, teknik ini mempunyai kelemahan yaitu: (1) Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat itu berbeda-beda baik antar daerah maupun dalam suatu daerah. (2) Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang untuk setiap daerah berbeda. (3) Bahan keperluan industri berbeda antar daerah.

Walaupun teori ini mengandung kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisahkan sektor basis dan non basis. Disamping mempunyai kelemahan, metode ini juga mempunyai dua kebaikan penting. Pertama, ia memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Kedua, metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui trend.

#### 2) Analisis Shift Share

Untuk menunjukkan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional, digunakan teknik analisis *shift share*. Teknik ini menggambarkan *performance* kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Dengan demikian, dapat ditunjukkan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektor, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Teknik yang mengkaji hubungan antara struktur ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Pertama-tama dikembangkan oleh Daniel B. Creanur (1943) dan dipakai sebagai suatu alat analitik pada permulaan tahun 1960-an oleh Ashby (1964) sampai sekarang. Teknik analisis *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri *mix* (bauran industri) (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri disebut *proportional shift* atau bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share*. Itulah sebabnya disebut teknik *shift-share*.

Untuk industri atau sektor i di wilayah j: (Prasetyo Soepono, 1993)

(1) 
$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

Bila analisis itu diterapkan pada pendapatan, yang dinotasikan dengan y, maka:

(2) 
$$Dij = y*ij - yij$$

(3) 
$$Nij = yij$$
 .  $rn$ 

(4) 
$$Mij = yij(rin - rn)$$

(5) 
$$Cij = yij(rij-rin)$$

Di mana: rij, rin dan rn mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai:

(6) 
$$rij = (y*ij-yij)/yij$$

(7) 
$$rin = (y*in-yin)/yin$$

(8) 
$$rn = (y*n-yn)/yn$$

Sedangkan yij = pendapatan di sektor i di wilayah j, yin= pendapatan di sektor di tingkat nasional, dan yn = pendapatan nasional, semuanya diukur pada tahun dasar. Tanda \* menunjukkan pendapatan pada tahun akhir analisis.

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3), bauran industri (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi suatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j adalah:

(9) 
$$Dij = yij \cdot rn + yij \cdot (rin - rn) + yij \cdot (rij - rin)$$

Persamaan ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Ini tercermin pada persamaan (3), persaman (3) menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor hendaknya paling sedikit tumbuh

dengan laju pertumbuhan nasional, yakni rn. Sesudah ditentukan besarnya pertumbuhan nasional, pertumbuhan suatu variabel wilayah yang tersisa merupakan suatu net again atau net loss (atau shift) bagi wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain perbedaan antara perubahan nyata pendapatan (sebagai variabel wilayah) dan pengaruh pertumbuhan nasional (persamaan 3) disebut net shift sektor i di wilayah j, net shift ini juga sama dengan total dari pengaruh bauran industri (persaman 4) dan pengaruh keunggulan kompetitif (persamaan 5).

Pengaruh bauran industri untuk sektor i akan positif di semua wilayah bila pendapatan (sebagai variabel wilayah) di sektor i tumbuh lebih cepat dari pendapatan keseluruhan (rin > rn). Demikian pula pengaruh bauran industri menjadi nol bila rin = rn, atau negatif bila rin < rn. Selanjutnya, keunggulan kompetitif untuk sektor i di wilayah j dapat positif, nol atau negatif bergantung apakah pertumbuhan pendapatan regional di sektor ini lebih cepat (rij > rin), sama dengan (rij = rin), atau lebih lambat (rij < rin) daripada pertumbuhan di sektor yang bersangkutan pada tingkat nasional. Selain itu suatu keunggulan kompetitif yang positif (negatif) mempunyai implikasi bahwa *share* suatu wilayah atas pendapatan nasional di suatu sektor tertentu, naik (turun) selama kurun waktu analisis.

Jika tiap komponen (pengaruh) *shift-shar*e dijumlah untuk semua sektor, tanda hasil penjumlahan itu menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah dalam pendapatan nasional. Pengaruh bauran industri total akan positif (negatif) di wilayah-wilayah dengan proporsi pendapatan diatas rata-rata di sektor-sektor dengan pertumbuhan yang cepat di tingkat nasional. Demikian pula pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif/negatif di wilayah-wilayah, tempat

pendapatan berkembang lebih cepat atau lambat daripada struktur bauran industri atau pendapatan (Soepono, 1993).

Menurut Soepono (1993) teknik analisis ini, mempunyai dua indikator positif, yaitu:

- Suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional.
- 2. Sektor-sektor perekonomian wilayah/daerah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor sejenis.

Teknik analisis ini merupakan hubungan identitas daripada hubungan keprilakuan, tetapi teknik analisis ini menunjukkan adanya spesialisasi, keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang mandiri dari suatu daerah/wilayah. Dan juga berguna untuk memberikan indikator-indikator hasil pembangunan wilayah/daerah. Hasil analisis ini dapat juga memberikan suatu dasar bagi pengambilan keputusan kebijaksanaan menyangkut komposisi industri atau sektor ekonomi wilayah/daerah.

#### 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Kota

Pada era 2000 teori perkembangan wilayah memadukan aspek ekonomi, pertumbuhan dan lingkungan yang telah berkembang dikenal dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mc Cann, 2001 dalam Ruchyat, 2010; 28 telah membuat model kuantitatif ekonomi wilayah yang mempertimbangkan daya dukung linkungan, khususnya dalam menghitung nilai sewa lahan untuk suatu wilayah yang mengalokasikan ruang terbuka hijau antara kota dan perdesaan hinterlandnya. Sasaran pembangunan ekonomi perkotaan salah satunya adalah mewujudkan keseimbangan dan keterpaduan hubungan antara perkotaan dan

perdesaan sehingga dapat menjamin tercapainya; peningkatan produktivitas kota, peningkatan efesiensi pelayanan dan kegiatan kota, pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan social yang mendukung jati diri kota. Pembangunan perkotaan juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat. Pembangunan perkotaan diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan kota berkualitas, menciptkanan kawasan layak huni, berkeadilan, berbudaya, dan sebagai wadah bagi peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat serta mewujudkan pusat pelayanan social, ekonomi dan pemerintahan.

Pengembangan wilayah merupakan suatu kajian yang mempelajari proses pembangunan dalam lingkup wilayah dan tata ruang. Dalam konsep mengenai ruang ekonomi (economy space) sebagai suatu konsep dalam pembangunan perlu dikembangkan karena peningkatan pengaruh polarisasi dan konsentrasi kegiatan ekonomi. Persoalan utama dalam pembangunan ekonomi wilayah adalah; persoalan penentuan economy landscape (tata pandang ekonomi), sebagai sub sistem spasial dari ekonomi nasional, analisis interaksi antar daerah yaitu arus pergerakan factor produksi dan pertukaran komoditas, kebijakan regional dalam peningkatan pertumbuhan suatu daerah (Rahardjo, 2010; 40-41).

Wilayah pembangunan menurut sebagian ahli ekonomi lebih banyak dikaitkan dengan wilayah perencanaan, sedangkan tata ruang ekonomi sebagai suatu daerah dimana terdapat pemusatan kegiatan ekonomi yang besar dan nyata berbeda dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Klasifikasi wilayah pembangunan dibagi menjadi daerah metropolitan (metropolitan region), poros pembangunan (development axes), daerah perbatasan (frontier region) dan daerah tertekan (depressed region). Klasifikasi lainnya dapat berdasarkan kepentingan mobilitas

intern dan ketidakserasian regional yaitu; daerah berpendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang, daerah yang berpendapatan per kapita tinggi tetapi kurang berkembang, daerah berpendapatan per kapita rendah tetapi berkembang, dan daerah yang berpendapatan per kapita tinggi dan berkembang.

Menurut Perroux dalam Rahardjo, 2010; 44 menyatakan dan bahwa tata ruang ekonomi itu adalah sebagai *a plan, a field of forces a homogenous aggregate*. Konsentrasi ekonomi umumnya terletak pada tata ruang perkotaan. Proses urbanisasi meningkat dan menimbulkan kesempatan ekonomi seperti lapangan kerja, pendidikan dsb. Disisi lain menimbulkan peningkatan ketegangan social, pencemaran lingkungan, kongesti lalu lintas dan dibidang industry memperlihatkan gap yang semakin besar dalam hal tingkat produktivitas di daerah perkotaan dan perdesaan yang menimbulkan kesenjangan regional.

#### 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota

Dalam pembahasan ekonomi perkotaan yang perlu dikaji adalah pertumbuhan kota-kota dan permaasalahnya dalam ekonomi pasar (kekuatan – kekuatan aglomerasi dan masalah lahan perkotaan). Dalam suatu ekonomi pasar dianalisis penggambaran terjadinya daerah metropolitan yang disebabkan karena pemilik – pemilik berbagai sumber daya produktif, berbagai bentuk tenaga kerja, dan modal beranggapan bahwa akan memperoleh keuntungan apabila sumberdaya-sumberdaya digunakan berkelompok di lahan perkotaan. Keuntungan karenan konsentrasi berbagai kegiatan produktif di daerah perkotaan disebut

dengan penghematan urbanisasi atau penghematan aglomerasi. Gejala pengelompokkan kegiatan usaha di daerah perkotaan mendorong perkembangan dan pertumbuhan kota yang semakin pesat. Kekuatan lokasional juga mempengaruhi daerah perkotaan, pelaku ekonomi akan memilih lokasi ekonomi yang strategis yaitu daerah perkotaan yang maju karena dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah mengenai permintaan dan harga pasar serta informasi pasar sehingga tidak kalah dalam persaingan.

Dalam menentukan lokasi permukiman dipengaruhi oleh factor aksesibilitas, fasilitas pelayanan ekonomi, dan social serta ketersediaan lahan. Lokasi lahan berpengaruh terhadap nilai/harga lahan, semakin mendekati pusat kota semakin tinggi harga lahan. Anomaly dengan penduduk miskin yang bertempat tinggal mendekati pekerjaan yang berada didaerah perkotaan menempati lahan yang relative sangat mahal. Sedangkan penduduk berpendapatan tinggi malah menjauhi pusat kota ke daerah pinggiran mencari daerah yang masih segar dan sehat udaranya, jauh dari kebisingan dan harga lahan relative murah.

Pola lokasi yang berkonsentrasi di daerah perkotaan menunjukkan respon individual untuk memperoleh penghematan biaya. Orientasi terhadap suatu pasar mendorong pemanfatan sumber daya secara kompetetif dan berlebihan sehingga menimbulkan kongesti lalu lintas dan tingginya harga lahan. Dalam analisis pasar dianalisis tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat diakibatkan persaingan kegiatan-kegiatan perkotaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan karena lokasi dekat pusat perkotaan namun disisi lainnya menderita kerugian akibat kemacetan dan ketidaksempurnaan pasar. Pertumbuhan kota tidak terlepas dar konsentrasi berbagai kegiatan penduduk yang berlangsung

mengikuti pola perkembangannya sendiri seperti masyarakat pertanian membantu masyarakat non pertanian di perkotaan dan kota-kota membantu keuntungan berbagai perusahaan dalam kompetesi dan bergerak professional. Sistem pasar sempurna menghendaki semua sumber daya dibeli dan dijual dan dilakukan untuk kegiatan yang paling menguntungkan pada semua waktu. Karl Polanji dalam Rahardjo, 2005; 10 menyatakan bahwa adopsi suatu pasar bebas untuk lahan dan tenaga kerja yang menyebabkan berlangsungnya migrasi dan perubahan tata guna lahan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkotaan dan kongesti di daerah perkotaan.

#### 2.7. Produkitivitas dan Kualitas Hidup Kota

Kota memberikan kemudahan proses produksi dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan kota. Kota menyediakan fasilitas kota serta variasi barang dan jasa bagi penduduk yang memungkinkan penduduk kota memiliki utilitas yang lebih tinggi. Semakin tinggi utilitas yang dapat dicapai suatu kota mempengaruhi pertumbuhan penduduk kota yang semakin cepat. Disisi lain, kota juga mempunyai berbagai permasalahan serius yang dapat menurunkan kualitas hidup kota.

Pertumbuhan produktivitas dan kualitas hidup kota dipengaruhi oleh karakteristik dasar kota. Beberapa karakteristik dasar kota yang mempengaruhi pertumbuhan produktivitas dan kualitas hidup (Bradley dan Gans, 1998) yaitu pengaruh kepadatan, aglomerasi ekonomi, human capital dan peran pemerintah.

#### 2.7.1. Pengaruh kepadatan

Efek kepadatan sering muncul dipicu oleh terlalu banyaknya pendudu. Tetapi kepadatan bukan semata fungsi dari variable jumlah penduduk, kepadatan juga dipengaruhi oleh variasi transportasi dan tata guna lahan perkotaan.

Peningkatan jumlah penduduk kota meningkatkan kepadatan penduduk berakibat pada peningkatan rent kota pengingkatan komuter bagi penduduk kota. Semakin besar ukuran kota berhadapan dengan permasalahan kota yang semakin kompleks. Sehingga peningkatan jumlah penduduk memberikan pengaruh negative terhadap kualitas hidup.

#### 2.7.2. Agglomerasi ekonomi

Agglomerasi ekonomi meliputi lokalisasi (economies of localization), urbanisasi (economies of urbanization) serta spesialisasi (economies of specialization). Lokalisasi dapat terjadi jika biaya produksi perusahaan dalam industri tertentu menurun ketika total output industri meningkat. Eksternalitas positif mendasari terbentuknya lokalisasi perusahaan dalam industri tertentu.

Lokalisasi ekonomi berasal dari eksternalitas informasi dari interaksi antar pelaku dan komunikasi langsung yang meningkatkan produktivitas dan pengembangan inovasi (Mills, 1967; Henderson, 1974; Kanemoto, 1980), akses yang luas terhadap diferensiasi input antara (intermediate input) (Abdel Rahman dan Fujita, 1990), kesesuaian pasar tenaga kerja yang menurunkan biaya pencarian kerja (Hesley dan Strange, 1990; Abdel Rahman dan Wang, 1995, 1997), kesesuaian penggunaan asset dalam pasar modal yang meningkatkan nilai pemeliharaan aset terhadap

kegagalan proyek (Hesley dan Strange, 1991) serta tercapainya kemampuan spesialisasi dalam pekerjaan tertentu yang meningkatkan produktivitas (Becker dan Hendersen, 2000)

Jenis kedua dari agglomerasi adalah urbanisasi. Urbanisasi terjadi jika biaya produksi perusahaan menurun ketika total output seluruh kota meningkat. Sullivan (1996) menegaskan perbedaan urbanisasi dengan lokalisasi; pertama urbanisasi merupakan hasil skala ekonomi dari seluruh perekonomian kota dan bukan hanya pada industri tertentu, kedua, urabanisasi memberikan keuntungan terhadap seluruh perusahaan di kota.

Urbanisasi ekonomi berasal dari eksternalitas teknologi antar produk (Abdel Rahman, 1990), penggunaan input antara tertentu secara bersama oleh banyak industri (Abdel Rahman, 1991, 1996) adanya *economies of scope* (Abdel Rahman dan Fujita, 1993; Abdel Rahman, 1994). Spesialisasi ekonomi berbeda dengan lokalisasi ekonomi. Spesialisasi lebih mengarah pada komposisi sektoral suatu kota, sedangkan lokalisasi berhubungan dengan komposisi industri. Secara empiris, spesialisasi berhubungan dengan suatu tingkat dimana kota terkonsentrasi pada sektor produksi tertentu.

Pengukuran tingkat spesialisasi suatu kota dilakukan dengan menggunakan Herfendahl Index (HI), sebagai berikut :

$$SPEC = \sum_{j=1}^{j} (Lj,t/Lj,t)^{2}$$

$$j=1$$

Spesialisasi di suatu kota memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan produktivitas (Weinhold dan Rauch, 1997)

### 2.7.3. Human Capital

Human capital mempunyai peran penting dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dewasa ini. Studi empiris lintas negara yang dilakukan Rebelo, 1987 dan Lucas, 1988 menggunakan konsep nilai kapital yang luas termasuk *human capital*. Sedangkan Becker dan Murphy (1988) mempertimbangkan proses transisi dinamis yang berhubungan dengan tingkat human capital per kapita. Peningkatan jumlah human capital per kapita mendorong peningkatan investasi fisik dan human capital, selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. Eksternalitas human capital muncul ketika adanya pekerja yang terdidik menyebabkan pekerja lainnya lebih produktif. Human capital juga berhubungan dengan tingkat kualitas tenaga kerja yang memproduksi barang-barang dan jasa yang mempunyai kualitas semakin tinggi (Stokey, 1990) tingkat kriminalitas yang lebih rendah, serta memberikan keuntungan secara sosial.

#### 2.7.4. Peran Pemerintah

Pemerintah berperan dalam penyediaan barang publik (public good), di kota yaitu penyediaan barang-barang dan jasa-jasa seperti pendidikan, jalan raya, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, penyediaan perlindungan keamanan, irigasi dan sebagainya yang diperlukan oleh seluruh penduduk kota. Untuk dapat membiayai

penyediaan barang publik bergantung dari seberapa besar kemampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran dan berapa pendapatan pemerintah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, berkorelasi dengan semakin besarnya pengeluaran yang dilakukan untuk pembiayaan kota.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachim AF, H, 2005, Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemkot Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, PPS Unair Surabaya
- Achjar, N., G.J.D. Hewings and M. Sonis. 2003. *Two-Layer Feedback Loop Structure of the Regional Economies of Indonesia: An Interregional Block Structural Path Analysis*. The Regional Economics Applications Laboratory (REAL) 03-T-17, www.uiuc.edu/unit/real.
- ADB, 2005, Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, Jakarta
- Adisasmita, H. R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Akses, 2009, *Laporan Khusus Gemerlapnya Kota Singa*, Majalah Akses Vol.12 / Oktober 2009, Deplu Jakarta
- Alim, M. R., 2006, Analisis Keterkaitan dan Kesenjangan Ekonomi Intra dan Interregioal Jawa dan Sumatera, Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Alisjahbana, A. S. dan B. P. S. Brojonegoro, 2004, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Proverty, and the Environment, Universitas Pajajaran-Press, Bandung.
- Arsyad, L., 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Awang Farouk Ishak, 2010, Pengaruh Nilai Tambah Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja sertaPertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, PPS Unair, Surabaya
- Basalim, U., M. R. Alim, dan H. Oesman, 2000, *Perekonomian Indonesia : Krisis dan Strategi Alternatif*, Unas-Cidesindo, Jakarta.
- Basri, H., 1999, *Pembangunan Ekonomi Rakyat Di Pedesaan*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Bechtel B. Robert, Marans W. Robert and Michelson William, *Methods in Environmental and Behavioral Research*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1987.

- Blakely, E.J., 1994, *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Publications.
- BPS, 2009, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, http/www. Bps.go.id Bryant, C. dan L. G. White, 1987, Manajemen Pembangunan Untuk Negera Berkembang, LP3ES, Jakarta.
- Budihardjo, Eko, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Chatib Basri, M, dan Pardede, R, 2011, *Indonesia; Calon Lokomotif Ekonomi Asia*, Majalah Tempo 13-19 Juni 2011, Jakarta
- Darmawati, 2004, *Pembinaan dan Penataan Pedagang Kakilima di Kota Pekanbaru*, Balitbangda Riau
- Depnaker, 2009, *Data dan Informasi Tenaga Kerja*, http/www.Depnaker.go.id
- Eddy Suratman, 2004, Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan terhadap Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat: Analisis Simulasi dengan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. V No.1 Juli 2004.
- Etharina, 2005, *Disparitas Pendapatan Antardaerah di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol 1 No.1 Agustus 2005. MPKP-FE UI. Jakarta
- Fitriadi, 2008, Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap PAD dan Penyerapan TK serta Kesejahteraan Sosek di Prov. Kaltim, PPS Unair Surabaya
- Gifford, Robert, *Environmental Psychology*, *Principle and Practice*, University of Victoria, 1987.
- Hadi, S. 2001. Studi Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi). Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hakim, L., B. Santosa, dan E. Setyaningrum, 2004, *Beberapa Agenda Perekonomian Indonesia Kritik dan Solusi*, DRFE-Usakti, Jakarta.
- Harris, James D. & Howard, William A, *The Role Meaning in the Urban Image*, Permisson of the Publisher, Sage Publications, Inc., 1972.
- Hartshorn, Asa Truman, *Interpreting The City An Urban Geography*, Georgia State University, 1980.

- Hidayat, S. dan D. Syamsulbahri, 2001, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Hidayat, S. dan D. Syamsulbahri, 2001, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Pustaka Ouantum. Jakarta.
- Holahan, Envorinmental Psychology, NY: Random House, 1982.
- Imam, Soedradjat, *Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*,
  Yayasa Sugianto Soegijoko, URDI, Jakarta, 2011
- ISEI, 2005. *Pemikiaran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia*, Buku 5, Penerbit Kanisius, Jakarta
- Jhingan, ML, 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta
- Imam Mulatif dan Bambang PS Brojonegoro, 2004, *Determinan Pertumbuhan Kota di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. V No.1 Juli 2004.
- Kuncoro, Mundrajat, 2010, *Ekonomika Indonesia*, UPP STIM YPKN, Yogyakarta
- Lang, Jon, Creating Architectural Theory, The Role of The Behavioral Sciences in Environmental Design, Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1987.
- Lang, Jon, Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences, Dowden, Hutchinson: Ross, Inc., Stroudsburg, Pensylvania, 1974.
- Lynch, Kevin, *The Image of The City*, MIT Press, Cambridge, 1960.
- Lynch, Kevin, What Time is The Place, MIT Press, Cambridge, 1972.
- Madrim, Djody Gondokusomo, *Keberlanjutan Kawasan Kota : Perspektif Kemiskinan dan Lingkungan*, Yayasa Sugianto Soegijoko, URDI, Jakarta, 2011
- Maliza and Feser, 1999, *Understanding Local Economic Development*, Center for Urban Policy Research, New Jersey.
- Pocock, Douglas and Hudon, Ray, *Images of The Urban Environment*, Department of Geography, University of Durham, 1978.
- Prebisch, R., 1964, *Toward a New Trade Policy for Development*, United Nations.
- Rachbini, D.J., 2004, Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Edisi pertama, Granit, Jakarta.
- Rahardjo, A, Ekonomi Perkotaan, Jakarta, 2005
- Rapoport, Amos, *Human Aspect Urban Form*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1982

- Rozi Munir dan Prijono Rijanto, 1981, *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Bina Aksara, Jakarta
- Sagir, S, 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Samiaji, B. T., 2006, Local Economic Development, Teori dan Penerapannya, Info URDI, Volume 15, urdi.pdf.
- Saragih, B., 1999, Membangun Masa Depan Ekonomi Indonesia Melalui Pembangunan Sektor Agribisnis, dalam buku Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia, Editor: St. Sularto
- Smardon, RC, Foundation For Visual Project Analysis, John Wiley and Son, New York, 1986.
- Sudrajat, Iwan, *Struktur Pemahaman Lingkungan Perkotaan*, Tesis S-2 Teknik Arsitektur ITB, Bandung, 1984.
- Sumodiningrat, G., 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Tempo, Majalah, 2011, Suplemen Majalah Tempo; World Economic Forum 13-19 Juni 2011, Jakarta
- Todaro, M. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 9. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Trancik, R, *Finding Lost Space*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1986.
- Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Wuryanto, L. E., 1996, Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia, An Interregional Computable General Equilibrium Approach, Dissertation, Cornell University, Ithaca, USA.

#### **GLOSARIUM**

**Pembangunan ekonomi** adalah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riel perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat

**Pertumbuhan ekonomi** adalah proses kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil jadi pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil per orang

**Kota** memiliki pengertian sebagai kesatuan ekonomi dan kesatuan politik yang secara ekonomi mencakup area yang didalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang menyatu dan batasanya ditentukan tingkat aktivitas ekonomi terintegrasi

**Kegiatan basis** adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah

**Kegiatan non basis** adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat

**Tata ruang ekonomi** itu adalah sebagai *a plan, a field of forces a homogenous aggregate* 

Ilmu Ekonomi Regional adalah cabang dari ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro dengan karakteristik khusus dalam bentuk memasukkan unsur lokasi dan ruang kedalam analisa Ilmu Ekonomi yang bersifat tradisional

**Ruang** (*space*) adalah kondisi nyata dan ada disetiap Negara

**Citra** adalah merupakan hasil dari adaptasi kognitif terhadap kondisi yang potensial mengenai stimulus pada bagian kota yang telah dikenal dan dapat dipahami melalui suatu proses berupa reduksi dan simplifikasi

**Persepsi** dapat diartikan sebagai pengamatan yang secara langsung dikaitkan dengan suatu makna tertentu

**Kondisi Pareto** adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya

# **INDEKS**

$\mathbf{A}$	I
Agglomerasi, 44	indikator, 30, 37, 38
aksesibilitas, 41	
Asumsi Adhoc, 30	K
В	kemerdekaan, 9
ь	Keuntungan Komparatif, 66, 67
bauran industri, 35, 36, 37	Kota, 3, 6, 7, 20, 21, 24, 25, 27, 38, 41, 43,
	69, 83, 90, 91, 93, 97, 101, 117, 118,
D	123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131,
2	132, 134
definis, 5	
	L
${f E}$	
	LQ, 30, 31, 32, 33
economies efficiency, 113	
ekonomi, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	$\mathbf{M}$
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,	
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40,	makro, 21, 48, 122, 134
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,	Metode Langsung, 30
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,	Metode Tidak Langsung, 30
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,	metropolitan region, 40
79, 80, 81, 82, 91, 93, 103, 108, 109, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122,	mikro, 21, 22, 48, 49, 51, 134 Mobilitas, 3
123, 124, 126, 128, 134	Model Basis Ekspor, 70
ekonomi pasar, 41	model kuantitatif, 38
Eksternalitas, 6, 44, 46	model Ruminatin, 50
ethical precept, 113	O
	O
F	Orientasi, 15, 42
frontier region, 40	P
<b>5</b> ,	1
G	parameter, 28
3	Pareto Condition, 112
GNI, 5	PDB, 10, 20, 28, 115, 122
	Pembangunan, 5, 9, 10, 14, 15, 39, 48, 52,
H	69, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 100, 127,
	129, 130, 131, 132, 133, 134
Hipotesis Neo-klasik, 73	

pembangunan ekonomi, 5, 10, 11, 14, 16, 38, 39, 81, 118, 120
politik, 6, 7, 9, 14, 20, 91, 92, 122, 134
premis, 9
produk nasional bruto, 16, 134
produktivitas, 17, 27, 31, 39, 40, 43, 44, 46, 79, 100, 115, 117, 122

#### R

riil, 10, 14, 16, 59, 134

#### S

sektor, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 61, 66, 67, 70, 79, 118, 120, 123, 124, 134
Sektor Non Basis, 31
Shift Share, 34
social welfare, 113, 114
sumberdaya, 15, 16, 29, 41, 66, 67, 75, 76, 77

#### T

taraf hidup, 9, 10, 16, 25, 112, 134 tenaga kerja, 5, 15, 17, 20, 25, 26, 30, 31, 41, 42, 44, 46, 56, 59, 67, 72, 125, 126 Teori basis, 29 tricle down effect, 5

## **TENTANG PENULIS**



DR. H. Ahmad Yunani, SE.M.Si. lahir di Barabai, pada tanggal 7 Pebruari 1973, yang sekarang menjabat sebagai Lektor Kepala di Universitas Lambung Mangkurat. Alamat rumah Komplek Subur Bastari RT 8 No. 62 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Berangas, Kab. Barito Kuala Prov.

Kalimantan Selatan. Mendapat gelar doktor pada tahun 2014 di Universitas Airlangga. Pelatihan profesional yang diikuti telah banyak sekali. Dimulai pada tahun 1999 dengan jenis pelatihan Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah di Perguruan Tinggi yang diadakan oleh Direktorat P2M Dikti dan Lemlit Unlam, dan pelatihan profesional terakhir yang diikuti yakni pada tahun 2017 dengan jenis pelatihan TOT Kebanksentralan yang diadakan oleh Bank Indonesia. Selain Pelatihan Profesional, penulis juga memiliki riwayat mengajar dan pengalaman penelitian yang cukup banyak dan beragam.